



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan dalam Harbani Pasolong (2014:38), kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Kemudian publik dalam Inu Kencana Syafii (1999:17-18) pengertian publik itu sendiri berasal dari bahas inggris (*public*) yang berarti umum, masyarakat atau negara. Maksudnya adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Di lanjutkan dengan pendapat Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam Wirman Syafri (2012:15) mengatakan publik adalah kelompok individu yang terkait oleh kepentingan bersama dan berbagai rasa atas dasar kebersamaan.

Selanjutnya kebijakan publik itu sendiri menurut Wiliam N. Dunn dalam Harbani Pasolong (2014:39) disebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan kewan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dalam perannya untuk memecahkan masalah, William N Dunn (1994:24) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan permasalahan publik melalui kebijakan adalah :

- a. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambil kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Abdul Wahab Solichin (2001:2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.2 Analisis Kebijakan Publik

Dalam Harbani Pasolong (2014:41-60), analisis kebijakan publik merupakan salah satu tahap dan langkah dari proses pembentukan kebijakan publik yang terdiri dari :

1. Analisis kebijakan
2. Pengesahan Kebijakan
3. Implementasi Kebijakan
4. Evaluasi Kebijakan

Sementara itu yang di maksud dengan analisis kebijakan itu sendiri menurut E. S. Quade dalam Harbani Pasolong (2014:41) yaitu bahwa asal mula analisis kebijakan di sebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijaka, bahkan menciptakan masalah baru.

Kemudian William N. Dunn (1994:220) menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

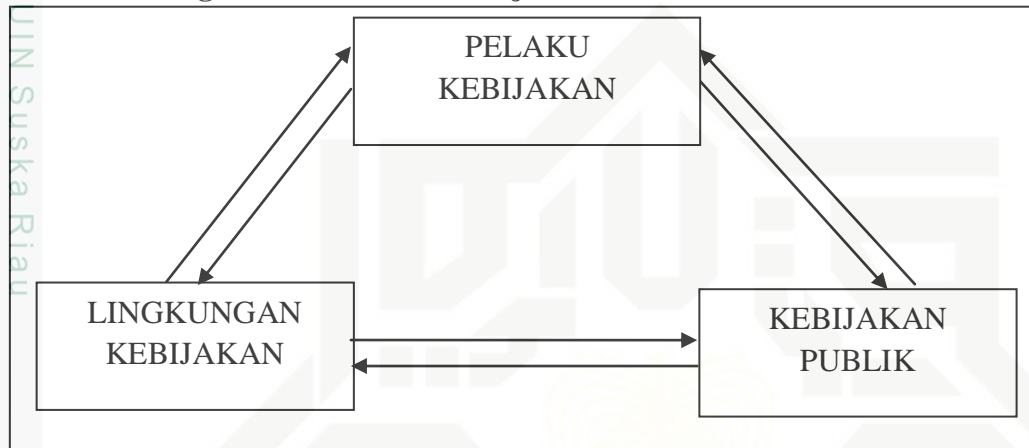
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun) yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah. Sebagaimana yang di jelaskan oleh William N.Dunn dalam bagan berikut:

Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber : William N.Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1994:110)

Maka mengikuti Dunn, metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim di pakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu :

- Definisi:** Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- Prediksi:** Menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu
- Preskripsi:** Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif dimana mendatang
- Deskriptif:** Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari di terapkannya alternatif kebijakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Jadi analisis kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan . Analisis kebijakan tersebut di gunakan guna menuntaskan permasalahan yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam masyarakat. Dimana pemasalahan tersebut dapat saja timbul dari kebijakan yang telah di buat sebelumnya. Maka analisis kebijakan publik berperan dalam lebih mematangkan kebijakan yang akan di ambil kedepannya dengan berpatokan dan belajar pada kebijakan yang telah di ambil sebelumnya sebagai contoh dan pembelajaran.

2.3 Administrasi Pembangunan

A. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan adalah salah satu cabang ilmu administrasi yang sangat mendukung pelaksanaan administrasi negara, yang mana dengan ilmu administrasi pembangunan ini akan lebih tajam dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah dalam administrasi negara terutama dalam pelaksanaan pembangunan, yang saat ini tengah menjadi fokus dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya administrasi pembangunan dalam Listyaningsih (2014:17) berasal dari kata administrasi dan pembangunan, yang masing-masing memiliki makna yang berbeda, secara umum pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan yang telah di putuskan dan di selenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Sedangkan pembangunan di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu di lanjutkan oleh Tjokroatmojo (2014 : 18) administrasi pembangunan di artikan sebagai suatu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang di rencanakan ke arah suatu keadaan yang di anggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Kemudian George F.Giant dalam Sudriamunawar (2002:22) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan sebagai penyempurna birokrasi (aparatur pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijaksanaan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan.

Sedangkan pendapat dari Fred W. Riggs (1994:77) bahwasanya administrasi pembangunan tidak saja berarti sebagai usaha-usah pemerintah melaksanakan program terencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaan, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program.

Lalu di lanjutkan definisi administrasi pembangunan menurut Sondang P Siagian (2003 : 5) yaitu seluruh usaha yang di lakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Dari definisi yang di sampaikan oleh para ahli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai administrasi pembangunan, Sondang P Siagian (2003 : 4-5) menyimpulkan bahwasanya terdapat 7 ide pokok dalam administrasi pembangunan yaitu, proses, sadar, terencana, pertumbuhan dan perubahan, modernitas, multidimensional, menuju kukuhnya keberadaan suatu negara.

Sehingga dari 7 ide pokok di atas dapat di simpulkan bahwasanya administrasi pembangunan adalah suatu rangkaian proses yang di lakukan oleh pemerintah bersama rakyat yang di lakukan secara sadar dan terencana demi menuju ke arah yang lebih baik lagi.

B. Fungsi Administrasi Pembangunan

Dalam Listyaningsih (2014:20) menyebutkan menurut Tjokroamidjojo secara sederhana administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi antara lain :

- *The Development Of Administrasion*, yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara, yang meliputi :
 - a) Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan
 - b) Pendayagunaan kepegawaian
 - c) Pendayagunaan ketatalaksanaan
- *The Administration of Deevelopment* yaitu perumusan kebijakan dan tata kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif, meliputi :
 - a) Administrasi perencanaan dan pemograman pembangunan
 - b) Administrasi pembiayaan pembangunan

- c) Administrasi program dan proyek pembangunan termasuk berbagai cara koordinasinya.
- d) Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pada uraian di atas dapat di lihat dengan jelas bahwas secara singkatnya *The Development of Administration* membahas tentang bagaimana mempersiapkan suatu perangkat pembangunan, yang mana di dalamnya terdapat pemberdayaan dan penyempurnaan terhadap organisasi, pegawai dan tatalaksananya. Sedangkan *The Administrasion of Development* membahas tentang bagaimana pembangunan itu di laksanakan meliputi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan, yang mana di dalamnya terdapat perencanaan, implementasi, pengawasan hingga evaluasi terhadap pembangunan.

2.4 Pembangunan Infrastruktur

Dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur dapat di artikan sebagai sarana dan prasarana umum. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan secara sederhana pembangunan itu sendiri adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Maka pembangunan infrastruktur itu sendiri dapat di artikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan

secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Kemudian di kutip dari salah satu penelitian terdahulu oleh Tunjung Hapsari (2011:16) di sebutkan bahwasanya pembahasan mengenai infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik. Hal ini di jelaskan oleh Stiglitz yang mengatakan bahwa infrastruktur merupakan salah satu barang publik murni (*impure public goods*). Sedangkan yang di maksud dengan barang publik itu sendiri adalah konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya.

Selanjutnya Abdul Haris (2009:1) dalam jurnal nya memaparkan seberapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu negara ataupun daerah, serta kendala dan hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam jurnalnya di simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Namun, begitu banyak hambatan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Hal tersebut dapat di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal . Dalam faktor internal dapat berupa minimnya anggaran pemerintah di sektor pembangunan, sedangkan dalam faktor eksternal dapat berupa permasalahan lahan ataupun permasalahan antara pemerintah dalam suatu daerah ataupun dengan daerah lain.

Berkaitan dengan paragraf di atas, permasalahan pembangunan infrastruktur sebenarnya adalah permasalahan yang kompleks dan membutuhkan peran besar dari pemerintah sendiri. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Waterson dalam Saul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Katz (1992:8) menyebutkan bahwasanya keterbatasan dalam pembangunan bukanlah semata-mata karena kekurangan dana (faktor internal), melainkan justru karena ketidak mampuan administratif.

Selanjutnya di paparkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi masyarakat
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Dari pembahasan di atas dapat di lihat bahwa pembangunan infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

2.5 Pembangunan Daerah

Adapun yang di maksud dengan pembangunan daerah dalam UU no 23 tahun 2014 adalah daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dimana pembangunan daerah sebagaimana merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagai mana yang tercantum dalam UU no 23 tahun 2014 BAB XVII “Kerja Sama Daerah Dan Perselisihan” pada Pasal 363-366 sebagai berikut :

1. Dengan daerah lain

a) Kerjasama wajib

merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kerjasama wajib dapat berupa kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda dan antar-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

b) Kerjasama sukarela

Dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

2. Dengan pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi:

- a. kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah
- c. kerjasama investasi
- d. kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.6 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 yang mana sekarang di jadikan acuan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah, yang di maksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana pada pasal 58 mengatur mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan antara lain : pemerintahan negara yang terdiri atas: a) kepastian hukum; b) tertib penyelenggara negara; c) kepentingan umum; d) keterbukaan; e) proporsionalitas; f) profesionalitas; g) akuntabilitas; h) efisiensi; i) efektivitas; j) keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam Nanang Nugraha (2013:1-2) menyebutkan otonomi berasal dari kata *autonomos* atau *autonomia* (yunani) yang berarti “keputusan sendiri” (*self ruling*). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan “desentralisasi” adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada hakikatnya otonomi adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk relatif dan inovatif dalam rangka memperkuat NKRI dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam tata kehidupan bernegara.

Dalam Haw Widjaja (2002:76) di sebutkan bahwasanya otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menutu prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya otonomi daerah merupakan kewenangan yang sah bagi daerah otonom dalam melaksanakan pemerintahan di daerah otonomnya sesuai dengan undang-undang berlaku.

2.7 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bedasarkan Permen no 9 tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan yang tercantum di dalam Perda Provinsi Riau no 10 tahun 2010 tentang “Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Barang Milik Daerah” menyebutkan bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dalam M. Yusuf, (2010:31-37) di paparkan bahwasanya pengelolaan aset daerah meliputi 3 fungsi yaitu :

a) Perencanaan

Untuk melaksanakan kewenangannya, baik itu yang menjadi kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan, pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berdasarkan rencana, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya.

b) Pelaksanaan

Setelah perencanaan dilakukan secara tepat, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

c) Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pengawasan sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

Selain itu pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang dipenuhi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut.
2. Akuntabilitas proses. Yaitu proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah.
3. Akuntabilitas kebijakan. Yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan barang daerah.

2.8 Pasar

Dalam Akhmad Mujahidin (2007:143) pasar juga dapat di artikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang mereka. Sedangkan para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain. Kemudian dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.

Kemudian menurut Damsar (2009:101) pasar adalah sebuah institusi, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, suatu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dan tindakan serta hubungan sosial yang membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Di pasar para pedagang dan pembeli untuk memperoleh untung, sehingga hampir di setiap tempat terdapat pasar, mulai dari yang tradisional sampai pasar modern.

A. Fungsi Pasar

Pasar memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sebagai fungsi promosi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya.

B. Pasar menurut Pelayanan dan Kelengkapannya

1. Pasar tradisional.

Dalam Damsar (2009:101), pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

2. Pasar Modern.

Pasar Modern merupakan pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi yang dikelola secara modern. Pada umumnya pasar modern menjual barang kebutuhan sehari-hari dan barang lain yang sifatnya tahan lama. Modal usaha yang dikelola oleh pedagang jumlahnya besar. Kenyamanan berbelanja bagi pembeli sangat diutamakan. Biasanya penjual memasang label harga pada setiap barang.

C. Pasar Menurut Fisik

1. Pasar Konkret

Pasar Konkret adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada.

2. Pasar abstrak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pasar Abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung.

D. Pasar menurut Waktu Terjadinya

1. Pasar harian yaitu pasar yang penyelenggaraannya setiap hari.
2. Pasar mingguan, pasar yang penyelenggaraannya setiap seminggu sekali.
3. Pasar bulanan, pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali.
4. Pasar tahunan, pasar penyelenggaraannya setahun

E. Pasar menurut Luas Wilayah Kegiatannya

1. Pasar lokal, yaitu pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
2. Pasar nasional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.
3. Pasar regional, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara.
4. Pasar internasional/pasar dunia, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia.

F. Pasar menurut Barang yang Diperjual-belikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pasar barang konsumsi, adalah pasar yang memperjual belikan barang yang secara langsung dapat dikonsumsi.
2. Pasar barang produksi, adalah pasar yang memperjual belikan barang produksi atau faktor-faktor produksi.

2.9 Definisi Konsep

1. Kebijakan Publik

Yaitu suatu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

2. Analisis Publik

Yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

3. Administrasi Pembangunan

Suatu kegiatan pemerintahan menuju kepada perwujudan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik oleh pemerintah namun tetap dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dan pihak lainnya.

4. Infrastruktur

Prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

5. Otonomi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah otonomnya

6. Pembangunan Daerah

Kegiatan Pemerintah Daerah menuju kepada perwujudan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh menuju arah yang lebih baik oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah otonomnya

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah dalam merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan, menggunakan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, hingga membiayai dan ganti rugi seluruh aset milik daerah

8. Pasar

Yaitu tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa, ditandai dengan adanya transaksi.

9. Identifikasi Masalah

Penelaahan informasi tentang alasan, bukti, sasaran, urgen serta akibat dari sebuah isu-isu yang berkembang akibat tidak terselesaikannya permasalahan dalam masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Identifikasi Alternatif Kebijakan

Menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya suatu masalah, menetapkan kebijakan alternatif yang akan di ambil kemudian menghubungkan antara masing-masing kebijakan tersebut dengan tujuan

11. Seleksi Alternatif Kebijakan

Membandingkan alternatif yang ada berdasarkan kemampuan pemecahan masalah yang ada, kemampuan pemecahan masalah secara efisien, tingkat legalitas nya terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan dalam memelihara dan memperbaiki intuisi-intuisi sosial.

12. Pengusulan Alternatif Kebijakan Terbaik Untuk di Implementasikan

Alternatif yang memiliki keterkaitan langsung dalam pemecahan masalah, tidak melanggar prinsip kebijakan publik serta dapat di pertanggung jawabkan

2.10 Pandangan Islam Tentang Pembangunan dan Kebijakan Publik

Dunia saat ini telah diintervensi oleh pemahaman pembangunan dari negeri barat. Dimana patokan dari keberhasilan pembangunan diukur dari kemajuan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, hak-hak asasi dan persekitaran. Paham barat hanya mementingkan pembangunan ekonomi sekular semata (pembangunan yang keduniawian). Padahal pada dasarnya, terwujudnya pembangunan secara fisik yang baik seperti ekonomi, modernisasi, industrialisasi dan lain-lain tersebut haruslah di landaskan oleh pembangunan moral, kerohanian dan agama yang baik dari para pelaku pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam islam sendiri, islam terlebih mendahulukan pembangunan moral dan agama guna terciptanya pembangunan fisik yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Sedangkan pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat islam dari semua aspek (moral, kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah untuk mencapai pembangunan dunia dan akhirat yang baik, haruslah di mulai dari peningkatan kebajikan umat dari segala aspek.

Pembangunan dalam Islam sendiri hendaklah dijalankan 2 tahap :

1. Tahap Pembangunan Kerohanian.

- Tahap pembangunan paling asas dalam Islam.
- Akal dan jiwa manusia perlu dibangunkan terlebih dahulu.
- Tumpuan utama pendekatan Islam adalah ke atas kejiwaan, moral dan etika-etika pembangunan.

2. Tahap Pembangunan Fizikal.

- Pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya.
- Tiga tahap keperluan: daruriat, hajiat dan tahsiniat
- Jika dibandingkan dengan barat yang hanya mementingkan pembangunan meterial / kebendaan. - dengan menyediakan segala kemudahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam **QS:Al-Anbiyaa | Ayat: 30**:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Pada ayat di atas di maksudkan bahwasanya langit dan bumi itu adalah suatu hal yang padu. Yakni berarti dunia dan akhirat itu adalah suatu yang satu dan tidak dapat di pisahkan, maka untuk mencapai kesuksesan di dunia, harus lah di barengi dengan kesuksesan di akhirat. Karna apabila kita mengejar kesuksesan di akhirat, insyaallah akan terbentuk moral dan agama yang baik sehingga dapat terwujud kesuksesan dan pembangunan yang baik di dunia.


Islam mementingkan pembangunan material dan pembangunan spiritual / kerohanian menyediakan suasana yang boleh membentuk akal yang sejahtera dan iman yang teguh kepada Allah S.W.T. di samping mewujudkan keadaan yang menjamin keamanan dan kebebasan dari rasa takut / tekanan jiwa.

Selain itu dengan membangun melalui aspek moral dan agama juga dapat menciptakan para pemimpin dan elit pemerintahan yang bertakwa serta mengikuti ajaran islam yang benar. Sehingga barang tentu kebijakan-kebijakan yang di ambil nantinya akan membawa kepada tujuan dan kepentingan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat bahwa kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus mampu mewujudkannya dalam kenyataan demi kesejahteraan rakyat dan teladan serta contoh bagi rakyatnya. Sebagaimana yang di terangkan dalam surah Asy Syu'araa ayat 84 :


 وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

Artinya : dan jadikanlah aku buah tutur (contoh teladan) yang baik, bagi orang-orang (yang datang) kemudian (generasi mendatang)

Dalam surah di atas di jelaskan bahwasanya pemerintah selaku pelayan masyarakat haruslah dapat menjadi manusia yang dapat mengkomunikasikan ide dan gagasannya serta mampu mewujudkannya dalam kenyataan. Jadi pemerintah bukanlah sosok yang hanya mengumbar janji bagi kesejahteraan bagi masyarakat, namun juga mewujudkannya dalam bentuk nya. Sebagaimana yang terjadi pada permasalahan pasar Cik Puan, dimana belum adanya penyelesaian yang nyata oleh pemerintah, maka pemerintah tentu di haruskan mengemukakan gagasan dan idenya serta mewujudkannya sehingga nyata bisa di rasakan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

2.11 Konsep Operasional

| NO | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|----|--|--|---|
| 1 | Analisis Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru | Identifikasi Masalah | a. isu-isu yang berkembang b. sasaran isu yang berkembang c. alasan dan bukti permasalahan d. urgensi suatu masalah e. akibat permasalahan yang terjadi. |
| | | Identifikasi Alternatif Kebijakan | a. faktor penyebab terjadinya masalah b. pengambilan alternatif kebijakan untuk di seleksi |
| | | Seleksi Alternatif Kebijakan | a. <i>technical rationality</i> (perbandingan antara alternatif dalam pemecahan masalah publik yang efektif) b. <i>economic rationality</i> (perbandingan antara alternatif dalam pemecahan masalah berdasarkan manfaat yang di peroleh) c. <i>legal rationality</i> (perbandingan antara alternatif dengan legalitasnya terhadap peraturan perundangan) d. <i>social rationality</i> (perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuan memelihara, mempertahankan serta memperbaiki institusi-institusi sosial) |
| | | Pengusulan Alternatif Kebijakan Untuk Di Implementasikan | a. tidak melanggar prinsip kebijakan publik b. dapat di pertanggungjawabkan secara keilmuan dan demokratis |

Sumber : Harbani Pasolong

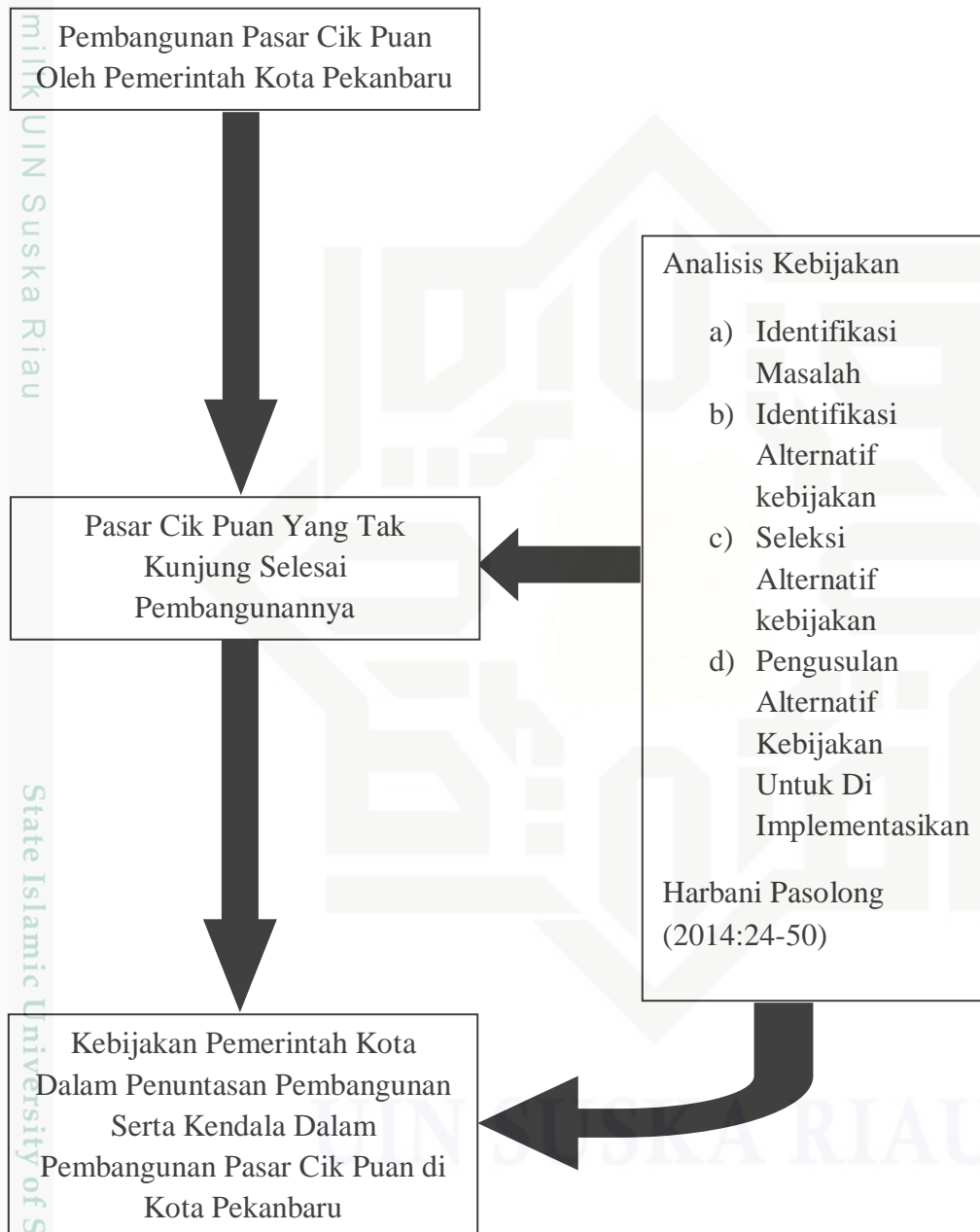
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Penelitian Terdahulu

1. Bambang Suherman (2014), UIN SUSKA RIAU yang mana dalam penelitiannya tentang “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Pesisir Studi Kasus: Desa Kubu I, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013” Penelitian ini di lakukan di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur di daerah pesisir di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yang kurang maksimal. Hasil penelitiannya mengungkapkan pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I kurang baik dengan kisaran nilai 67,13 % dan upaya yang di lakukan oleh aparat desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I yaitu dengan membuat proposal pembangunan kepada pihak kabupaten dan membuat swadaya masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan.
2. Widy Loy Santo (2016) Universitas Lampung yang mana dalam penelitiannya tentang “ Formulasi Kebijakan Pembangunan Pasar Induk Modern Kemiling di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini di lakukan di Bandar Lampung. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk formulasi kebijakan pembangunan pasar induk modern kemiling Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian dan analisis mengenai formulasi kebijakan pembangunan pasar induk modern kemiling di ketahui bahwa secara keseluruhan proses perumusan kebijakan pembangunan pasar induk modern kemiling adalah keputusan Pemerintah Kota Bandar Lampung, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif kebijakan pembangunan pasar induk modern Kemiling satusatunya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota bandar lampung sehingga tidak memecahkan masalah melainkan menimbulkan masalah terbengkalainya bangunan pasar.

3. Amin Hatta (2016) UIN SUSKA Riau yang mana dalam penelitiannya tentang “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan di desa Ukui Dua. Berdasarkan hasil penelitian ini Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan “kurang baik”, dengan persentase 75%. Secara menyeluruh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Kepala Desa “Kurang Baik melaksanakan peranannya dalam pembangunan di Desa Ukui Dua yaitu peranannya sebagai stabilisator, inovator, pelopor dan modernisator.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Permasalahan yang peneliti angkat disini yaitu tentang analisis kebijakan Pemerintah Kota dalam menuntaskan permasalahan pembangunan pasar Cik Puan Pekanbaru dengan lokasi dan tempat yang berbeda. Serta penulis ingin mengetahui bagaimana Analisis Kebijakan Pemerintah Kota dalam menuntaskan pembangunan pasar Cik Puan yang telah lama terhenti, berserta kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru.